

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah kota diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang keuangan daerah menegaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam APBD mencerminkan kemampuan pemerintah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.

Undang-undang di atas mengandung penekanan bahwa adanya proses yang lebih cepat untuk untuk mewujudkan masyarakat yang

semakin sejahtera melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Undang-undang di atas juga telah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan penuh untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan, kecuali bidang-bidang tertentu yang telah ditetapkan peraturan pemerintah. Tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah juga semakin besar.

Seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia yang berbasis otonomi daerah, tuntutan kinerja yang baik sering ditujukan kepada para manajer pemerintah daerah, sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan penyerapan anggaran Pemerintah Daerah. Kinerja ini ditekankan menuju peningkatan kesadaran dari peran pelaporan tahunan dalam upaya peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah merupakan kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan konsep *value for money*, yang dimana mengandung pengertian konsep

pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama yaitu, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Pesatnya pembangunan daerah menuntut tersedianya dana bagi pembiayaan pembangunan yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi sumber-sumber pembiayaan yang semakin besar. Tatanan dari Pemerintah Pusat yang mengarah pada diperluasnya otonomi daerah menuntut kemandirian daerah di dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Hal yang sepatutnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang dan memperkuat struktur perekonomiannya termasuk menggali sumber-sumber keuangannya agar dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Salah satu tujuan laporan keuangan pemerintah yaitu, pertanggungjawaban (*accountability and stewardship*) yang memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap dan cermat dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah. Selain kewajiban menyampaikan laporan keuangan, juga perlu dilakukan penilaian apakah Pemerintah Daerah yang bersangkutan berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak. Indikator dari keberhasilan Pemerintah Daerah untuk menyusun

Laporan Keuangan yang baik adalah opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini merupakan pernyataan atau pendapat profesional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini ini didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dan efektivitas Sistem Pengendalian Interen.

Keberhasilan sebuah pemerintah daerah tidak dapat hanya diukur semata-mata dari surplus atau defisitnya laporan keuangan¹. Keberhasilan pemerintah daerah juga harus diukur dari kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisa rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penggunaan analisis rasio keuangan secara luas telah digunakan oleh *private sector*, sedangkan pada lembaga publik penggunaannya masih terbatas. Padahal dari hasil analisis dapat diketahui tingkat kinerja Pemerintah Daerah dan diharapkan dapat dijadikan suatu acuan untuk meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun.

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara, secara tidak langsung dituntut untuk memberikan contoh untuk mengaplikasikan

¹ Deddy Nordiawan, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 157.

kinerja keuangan yang baik. Kinerja keuangan tersebut dapat diukur melalui laporan keuangan yang dibuat sebagai pertanggungjawaban pemerintah dalam bidang keuangan. Hasil audit BPK mengenai laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2008 sampai dengan 2010 menghasilkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)². BPK memahami, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki karakteristik yang berbeda dengan 32 Provinsi lainnya di Indonesia yaitu merupakan gabungan dari lima kota administrasi dan satu kabupaten administrasi kepulauan seribu. Laporan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta merupakan hasil penggabungan dari 722 laporan keuangan SKPD, yang digabungkan menjadi 46 laporan keuangan entitas akuntansi, penggabungan yang pada akhirnya dikompilasi menjadi Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta, sehingga dalam proses penyusunannya menjadi lebih kompleks³.

Pemerintah sebenarnya telah kerja keras dalam memperbaiki administrasi keuangan daerah agar meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, namun usaha tersebut masih belum berjalan maksimal. Terbukti dari hasil penilaian laporan keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta tahun 2008 masih dinilai wajar dengan pengecualian (WDP), belum sampai pada penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP)⁴.

² Diakses dari <http://www.jakarta.go.id>, pada tanggal 11 Maret 2012 pukul 20.11

³ Diakses dari <http://www.detik.com/finance> pada tanggal 29 April 2012 pukul 15.30

⁴ Diakses dari <http://www.beritajakarta.com>, pada tanggal 29 April 2012 pukul 15.40

Perbandingan kinerja keuangan selama tiga tahun terakhir bisa jadi bahan acuan, apakah kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sekarang masih layak dipertahankan atau tidak, mengingat tidak lama lagi akan diadakan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Berdasarkan berbagai latar belakang di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: *“Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara Tahun 2008-2010”*.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dengan itu rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara tahun 2008-2010?
2. Apakah terdapat peningkatan yang signifikan pada kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara tahun 2008-2010?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta antara tahun 2008-2010.

2. Manfaat

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat mempunyai manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

a. Bagi Perusahaan/instansi adalah

- 1) Sebagai bahan evaluasi dalam mengatur keuangan daerahnya pada tahun-tahun yang akan datang.
- 2) Membantu pemerintah daerah dalam melakukan pengukuran kinerja keuangannya dimana masih jarang sekali yang melakukan pengukuran kinerja keuangan pada sector publik.

b. Bagi Mahasiswa

- 1) Sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah..
- 2) Mendapatkan pengetahuan mengenai perkembangan kinerja keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta dari tahun 2008-2010.

c. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

- 1) Sebagai sarana evaluasi kurikulum pendidikan yang dijalankan.
- 2) Sebagai bahan tambahan pustaka.

d. Bagi Penulis Selanjutnya

Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para penulis yang ingin melakukan penulisan mengenai Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah selanjutnya.